

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas terhadap pengendalian internal pemerintah seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya, yaitu Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP memiliki tugas untuk mengawasi keuangan negara ataupun daerah, dan pembangunan nasional, seperti yang ditetapkan oleh presiden dalam Peraturan Presiden Pasal 2 No. 192 Tahun 2014.

Pada tahun 2019 dan 2020 Indonesia memasuki masa-masa sulit, yaitu menghadapi fenomena alam berupa maraknya penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan adanya ketidakstabilan baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Semasa pandemi yang terjadi di tahun 2020, dengan sebuah Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020, dan diberitakan oleh portal berita elektronik Presiden Joko Widodo menugaskan jajaran Polri, KPK, Kejaksaan serta Lembaga Pengawas Internal Pemerintah untuk mengawasi anggaran Covid-19. Pernyataan presiden tersebut juga tercantum dalam. Pernyataan presiden tersebut sejalan dengan tugas yang telah ditetapkan oleh presiden dalam Perpres Tahunu 2014 yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penugasan presiden. Namun di pertengahan tahun 2021 terungkap bahwa telah terjadi penggelapan anggaran bantuan sosial oleh mantan Menteri sosial. Hal tersebut dapat disebabkan karena minimnya pengawasan yang dilakukan, sehingga dapat pelaku mendapatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut.

Menanggapi keadaan tersebut, BPKP diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal sehingga dapat memberikan hasil yang berkualitas dan dapat dipercaya kebenarannya oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun dapat mempercayai bahwa proses dan kinerja yang diberikan adalah baik dan benar adanya. Hasil yang telah tercapai atas kemampuan pekerjaan tersebut dapat didefinisikan sebagai sebuah kinerja. Lembaga Administrasi Negara

mendefinisikan kinerja organisasi merupakan tingkat pencapaian atas kebijakan. Berlaku pula untuk kinerja auditor baik eksternal maupun internal, termasuk auditor fungsional BPKP sebagai auditor intern pemerintah. Dapat dikatakan bahwa kinerja auditor pemerintah adalah keefektifan dan keefesiensian hasil kerja/pencapaian atas tujuannya yaitu melakukan pengawasan dan pembangunan baik secara nasional maupun tingkat daerah.

Terdapat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kinerja auditor secara individu, baik secara eksternal maupun internal. Beberapa diantara faktor internalnya adalah profesionalisme, independensi, obyektivitas, komitmen terhadap organisasi. Faktor internal tersebut merupakan sikap dan keyakinan yang terdapat dari dalam diri auditor tersebut. Berbeda dengan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya seperti struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi yang diberikan oleh seorang pimpinan kepada auditornya, budaya organisasi dan konflik *of interest* yang dialami oleh auditor.

Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor baik eksternal maupun internal, baik pula bagi sebuah perusahaan maupun organisasi publik adalah sikap independen. Sikap independensi yang dimiliki oleh auditor memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pemeriksaan, pengawasan dan menyatakan kesimpulannya. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Tahun 2020, dijelaskan bahwa independensi merupakan sikap yang memungkingkan menyatakan suatu kesimpulan tanpa adanya pengaruh dari tekanan yang dapat menimbulkan adanya kecurangan karena terdapat hubungan khusus antara auditor dan klien. Dengan adanya sikap independensi dalam diri auditor, akan menghasilkan kinerja yang baik (Aminah dan Mahdi; 2015, Sholikkah, 2017). Jika diimplementasikan dalam pemerintahan maka auditor internal pemerintah yang memiliki sikap independensi akan mengawasi dan memeriksa perkembangan aparat lainnya tanpa adanya hubungan satu sama lain, dengan demikian hasil yang diberikan akan baik dan benar adanya.

Sama pentingnya dengan independensi, auditor juga harus memiliki sikap profesionalisme. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan profesionalisme sebagai kelebihan dan karakteristik khusus yang dimiliki oleh seorang yang

profesional. KBBI juga menjelaskan makna dari profesional adalah kepandaian khusus. Auditor merupakan suatu profesi dalam bidang keuangan, auditor diharapkan melaksanakan tugasnya dengan menggunakan kepandaian khusus/kemampuan yang dimilikinya. Auditor yang melakukan tugas dengan kemampuan yang dimilikinya akan memberikan kualitas kerja yang baik dan benar, sehingga auditor yang memiliki sifat profesionalisme dapat memberikan kinerja audit yang baik dan dapat dipercaya kebenarannya.

Untuk mendukung sikap independensi dan profesionalismenya, prinsip lain yang harus diterapkan oleh auditor adalah *good governance* guna menciptakan *governance* yang baik dan bersih. Istilah *good governance* tersebut berarti tata kelola yang dilakukan pemerintah dan non-pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Lembaga Administrasi Negara (2000:6) juga menjelaskan segi fungsional *good governance* dapat ditinjau dari efektif dan efisien atau tidaknya fungsi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah digariskan (LAN, 2000:1,5). Sebagai salah satu lembaga pemerintah, auditor yang bekerja di BPKP diharuskan untuk memahami dan menerapkan *transparacny, responsibility, fairness, accountability and independency* seperti yang disampaikan dalam *website* resmi BPKP. Dengan menerapkan pilar-pilar *good governance* seperti yang telah disebutkan, masyarakat dapat memercayai bahwa proses yang telah dilakukan dan hasil yang telah dihasilkan adalah benar adanya. Sehingga masyarakat dapat menilai pula bahwa kinerja yang dihasilkan oleh aparat pemerintahan adalah baik dan bersih.

Tidak hanya sikap-sikap tersebut yang harus dimiliki oleh seorang auditor, pengalaman auditor juga dapat mempengaruhi proses pengawasan dan penarikan kesimpulan. Pengalaman Kerja auditor dapat dilihat melalui berapa lama dan berapa banyak tugas yang telah dilakukan dan diselesaikan oleh auditor. Insting seorang auditor dalam menemukan masalah dan meminimalisasi kesalahan dalam melakukan audit dapat diasah dengan semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh auditor tersebut (Faizal, 2015). Penelitian sebelumnya menunjukkan lama karier dan penugasan auditor berbanding lurus dengan kinerja auditor. karena auditor tersebut memiliki wawasan dan pola pikir yang semakin baik atas penugasan-penugasan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki motivasi untuk menganalisa apakah independensi, profesionalisme, penerapan *good governance* dan pengalaman kerja auditor merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah, maka peneliti menghasilkan sebuah judul terkait hal tersebut yaitu “Fakfor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor Pemerintah”.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Beragamnya hasil penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor, seperti hasil riset yang dilakukan Aminah dan mahdi (2015), Sholikkah (2017) menghasilkan independensi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja auditor, sedangkan Setyawati (2016), Fachruddin (2019) menunjukkan hasil sebaliknya, yang mana kinerja auditor tidak dipengaruhi oleh independensi. Di sisi lain, hasil penelitian terhadap topik yang sama oleh Setyawati (2016), Fachruddin (2019) menunjukkan hasil sebaliknya, di mana kinerja auditor tidak dipengaruhi oleh independensi. Beragamnya penelitian juga terjadi di variable berikutnya, *good governance*. Hasil penelitian dari Aminah dan Mahdi (2015), Setyawati (2016) menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan *good governance* mempengaruhi kinerja auditor secara positif. sedangkan Hatta (2020) menghasilkan bahwa kinerja auditor tidak dipengaruhi oleh *good governance*. Berbeda dengan variable-varabel yang lain, belum ada penelitian yang menggunakan variable pengalaman kerja yang menunjukkan keragaman hasil terhadap kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Utami, Kamaliah, dan Rofika (2015), Tumundo dan Sondakh (2019) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Dengan beragamnya hasil penelitian tersebut, peneliti merumuskan sebuah masalah yang menjadi fokus penelitiannya yaitu: (1) apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah? (2) apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah? (3) apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah? (4) apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian berikut adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai (1) pengaruh independensi terhadap kinerja auditor internal pemerintah, (2) pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor internal pemerintah, (3) pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja auditor internal pemerintah, serta (4) pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja auditor internal pemerintah.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kinerja auditor, sebagai variabel terikat dipengaruhi oleh profesionalisme dan pengalaman kerja, namun tidak dipengaruhi oleh penerapan good governance dan pengalaman kerja.

1.5 Kontribusi Riset

Penelitian berikut memiliki kontribusi untuk menguji hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta menambah literatur dan wawasan bagi peneliti selanjutnya yang akan memperhatikan focus atau topik serupa, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor internal pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab 1 memuat latar belakang dari penelitian, kesenjangan yang terjadi dalam penelitian, rumusan permasalahan, tujuan serta ringkasan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 memberikan penjelasan dari teori yang digunakan, penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, Hipotesis yang dikembangkan, serta gambaran dari kerangka konseptual.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab 3 menjabarkan metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kuantitatif yang memanfaatkan primary data, dengan pengumpulan kuesioner. Populasi yang diambil untuk riset ini adalah para auditor fungsional BPKP Provinsi Jawa Timur dengan mengaplikasikan teknik *nonprobability* sample dengan metode *purposive sampling*. Untuk menganalisis data, digunakan teknik *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 22.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menguraikan tentang hasil uji data dan uji hipotesis penelitian, serta pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut dengan dukungan dari penelitian sebelumnya.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran terhadap simpulan penelitian